

Siasat Difabel Melawan Diskriminasi di Ranah Formal: Praktek Kebijakan Sekolah Inklusi di Yogyakarta

Pratiwi

PKPPA I Lembaga Administrasi Negara, Jl. Kiara Payung, Sumedang,
Telp. (022) 7790048, Fax (022) 7790055, e-mail: pratiwisaja@gmail.com

The Finesse of Disabled People to Reveal Discrimination in Formal Area : Inclusive School Policy Practice in Yogyakarta

The objective of this research is to study learning process in inclusion education and discrimination behavior against disabled students in SMA Pembangunan Yogyakarta as a kind of inclusion school. The main spirit of inclusion education process is awareness of tolerance over existence reality. Inclusion school was begun by disabled people movement as a main catalyst. SMA Pembangunan Yogyakarta is selected as a research object. Interview guide was used as technique to collect primary data. Interview was conducted with all subjects in inclusion school such as course teachers, special advisor teacher, students, and high school principal. The result of this research indicated that learning process modification decrease discrimination. There are some education policies such as standard score for national final examination, standard curriculum, and limited access to entry inclusion school for mental retardation that contradicts with inclusion spirit. In other side, there were teachers caring disabled students, involving disabled students and take maximal efforts to teach different students, so their academic achievement is more optimum and discrimination against disabled student decrease. There are some kind of power that may support inclusion school existence such as modification curriculum technique, need of achievement from disabled students and consistent struggle from the main catalyst of inclusive school.

Keywords: *disabled students, inclusion school and discrimination.*

"Dehumanization, although a concrete historical fact, is not a given destiny but the result of an unjust order that engenders violence in the oppressors, which in turn dehumanizes the oppressed"
Paulo Freire, *Pedagogy of The Oppressed*, 1968.

A. Pendahuluan

Difabel atau penyandang cacat acapkali menempati urutan kedua dalam masyarakat, dianggap tidak mampu kemudian mengalami beberapa manifestasi penindasan. Diskriminasi yang dialami difabel bukanlah asumsi semata. Dalam akses pekerjaan di sektor formal, beberapa pabrik telah melakukan upaya khusus untuk mempekerjakan mereka, meski demikian penyandang

cacat tetap menghadapi diskriminasi di tempat kerja. Penelitian tentang potret difabel Pekanbaru yang pernah dilakukan pada Januari hingga Februari 2007 oleh Persatuan Kesejahteraan Penyandang Cacat mengungkap minimnya aksesibilitas infrastruktur publik untuk difabel serta rendahnya tingkat pendidikan mayoritas difabel sehingga jarang yang mengakses pekerjaan di sektor formal.

Pemerintah mendirikan sekolah luar biasa untuk meningkatkan partisipasi difabel dalam layanan pendidikan. Pada kenyataannya, penyelenggaraan sekolah luar biasa justru mempertajam tingkat segregasi dan diskriminasi. Siswa yang bersekolah di sekolah luar biasa akan mengalami ketimpangan penerimaan setelah mereka terjun ke lingkungan masyarakat umum. Beberapa orang tua juga malu menyekolahkan anaknya ke sekolah luar biasa.

Diskriminasi yang dialami difabel kemudian mendorong mereka untuk melakukan tindakan emansipasi dengan memasuki ranah formal. Pengesahan Undang-Undang (UU) No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dimasukkannya sistem persekolahan inklusi dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan munculnya Surat Edaran nomor 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang Pendidikan Inklusi tidak lepas dari upaya mereka yang secara mandiri dan terorganisasi memperjuangkannya.

Sekolah inklusi didirikan untuk membebaskan difabel dari pemahaman diskriminasi lantaran mereka dicatikan. Kecacatan atau keterbatasan fisik dan mental merupakan rekayasa atau rekonstruksi sosial yang sengaja dibangun melalui sistem kekuasaan, baik yang berada pada jalur struktural maupun jalur kultural. Keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali memperhitungkan orang-orang yang mempunyai *impairment* dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas sosial.¹ Mansor Fakih pun juga

memandang persoalan difabilitas² atau kecacatan bukan sebagai persoalan medis melainkan sebagai persoalan sosial. Pada premis yang lain, Girolam Cardano menyatakan bahwa indera-indera dalam tubuh manusia saling menggantikan, sehingga bila indera penglihatan hilang, indera lain akan berfungsi secara lebih sebagai dasar bagi aktifitas kognitif dan belajar.³ Istilah "si cacat" tidaklah tepat untuk menyebut manusia yang dikonstruksikan tidak mampu melakukan sesuatu seperti halnya kebanyakan manusia yang lain.

Keberbedaan kemampuan difabel kini tidak lagi relevan menjadi alasan untuk memisahkan akses pendidikan dalam sekolah khusus. Hasil penelitian E. T Baker pada 1994 dari Temple University tentang metanalisis terhadap praktek pendidikan inklusi menunjukkan bahwa pendidikan inklusif berdampak positif, baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkelainan dan teman sebayanya.

Perwujudan sekolah inklusi menjadi manifestasi gerakan kesetaraan bagi difabel untuk mengakses fasilitas publik seperti pendidikan. Sekolah inklusi adalah sekolah yang tanggap terhadap kebutuhan semua anak yang berbeda fisik dan mental di masyarakat.⁴ Sistem dalam persekolahan yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang

² Difabel diserap dari Bahasa Inggris yakni *differently abilities*, perbedaan kemampuan. Istilah ini direduksi untuk menegaskan bahwa ketidaknormalan tidak dipandang sebagai perspektif kekurangan, namun hanya diferensiasi kemampuan.

³ Edvard Befring & Reidun Tangen, *Specialpedagogikk* (Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 1994) hlm 95-114.

⁴ Sue Stubbs, *Inclusive Education Where There Are Few Resources*, diterjemahkan oleh Susi Sevtiana R (Oslo: The Atlas Alliance, 2002) hlm 26.

¹ Coleridge, Peter. *Pembebasan dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) hlm. 137-138.

layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil. Dinamika gerakan difabel di ranah pendidikan yang kian menggema kemudian mendorong penulis untuk menjari jawaban atas pertanyaan: Bagaimana institusi formal sekolah inklusi membuka partisipasi difabel dalam proses pengajaran untuk mengurangi diskriminasi?

B. Kerangka Konseptual

Teori pendidikan konservatif yang mengukur keberhasilan pendidikan dari kemajuan industri abai terhadap upaya demarginalisasi dan upaya memfasilitasi potensi anak. Banyak sekolah yang masih menganut teori pendidikan ini. Salah satunya, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pahandut, Palangkaraya, yang tergolong sekolah percontohan ini menolak salah satu siswa yang lolos tes masuk intelegensi karena panjang jemari tangannya hanya satu buku jari manusia kebanyakan.⁵ Kelainan tersebut tidak akan menghalangi siswa dalam belajar karena siswa yang bersangkutan kidal.

Teori diatas kontras dengan pandangan sosiologi pendidikan gaya baru yang menjadi pijakan ideologis sekolah inklusi. Pembongkaran kepentingan di balik pengetahuan objektif, kritik terhadap penindasan terhadap siswa dan sekolah sebagai agen perubahan merupakan tiga pilar teori sosiologi pendidikan baru.⁶ Diskriminasi yang tercipta di sekolah luar biasa dalam

wujud pengkotak-kotakan institusi pendidikan berusaha ditekan dalam sekolah inklusi. Diskriminasi dalam penelitian ini adalah sebuah keadaan ketika difabel tidak difasilitasi kebutuhannya di sekolah inklusi. Sekolah inklusi menurut seminar Agra dan Kebijakan Afrika Selatan menetapkan beberapa batasan antara lain :⁷ lebih luas daripada sekolah formal, mengakui bahwa semua anak dapat belajar, memungkinkan struktur, sistem dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak, mengakui perbedaan pada diri anak mencakup: usia, gender, etnik, bahasa, perbedaan fisik dan mental, dan gangguan kesehatan yang diidap, merupakan proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya, serta merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang anti diskriminasi.

Menurut Paulo Freire, terdapat dua persyaratan pendidikan yang membebaskan suatu kaum dari diskriminasi. Dalam konteks sekolah inklusi, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Persepsi dan kesadaran subjek pendidikan terhadap isu diskriminasi

Kesadaran dalam diri membuat manusia mampu mengambil jarak dari yang lain dan dirinya sendiri.⁸ Dalam konteks pendidikan inklusi yang diperlukan adalah kesadaran dari semua pihak untuk memandang difabel sebagai subjek yang berbeda kemampuan dengan manusia lain. Difabel berhak

⁵ "Masih Ada Diskriminasi Difabel di Sekolah" *Kompas*, 5 Juli 2007, hlm 36.

⁶ Paulo Freire dalam *Pendidikan, Kekuasaan, dan Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) Hlm. 10.

⁷ Sue Stubbs, *op.cit*, hlm 38

⁸ Penafsiran A. Sudiarta tentang prasyarat filsafat pendidikan kritis ini ada dalam "Driyarkara: Pendidikan Kepribadian Nasional", *Basis*, No. 7-8 tahun 56, hlm. 4-5, Juli-Agustus 2007.

mendapat kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan meski berbeda. Difabel tidak perlu dipisahkan dalam sekolah luar biasa lantaran ia dianggap tidak mampu belajar di sekolah reguler. Sekolah inklusi membutuhkan persepsi guru, orang tua dan pemerintah untuk tidak mendiskriminasi difabel dan menanamkan perasaan percaya diri pada difabel.

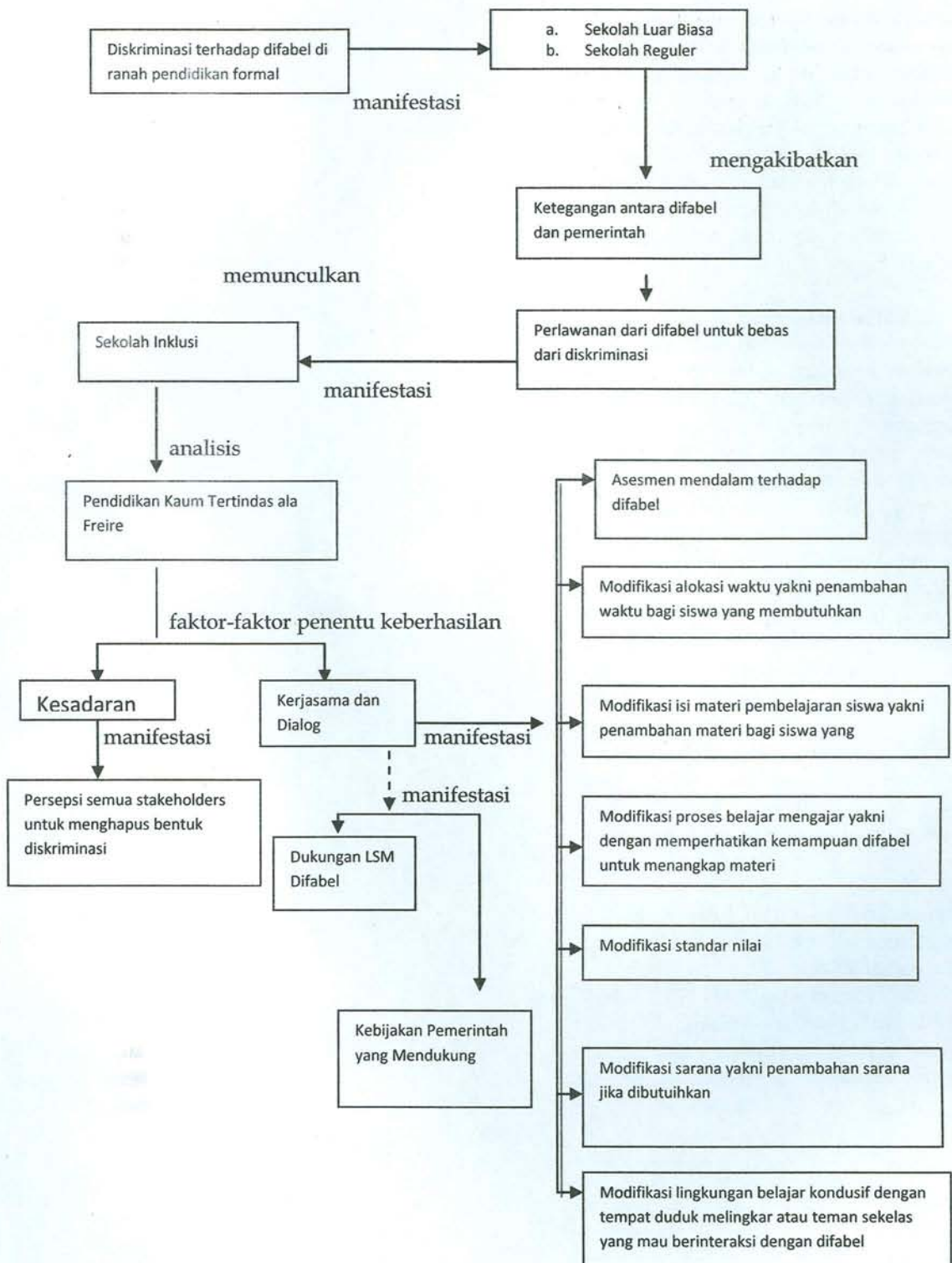
2. Kerjasama

Kesadaran semua *stakeholders* sekolah inklusi terwujud dalam kerjasama sebagai tindakan praktis. Kerjasama sebagai suatu ciri tindakan yang membebaskan- yang berlangsung hanya diantara pelaku-pelaku (yang tentunya dari berbagai tingkat dan tanggung jawab)- hanya dapat tercapai melalui komunikasi.⁹ Partisipasi semua *stakeholders* sekolah inklusi menjadi perwujudan proses kerjasama ini. Manifestasi kerjasama dalam pendidikan kaum tertindas menurut Freire berupa reformulasi kurikulum, sistem pengajaran yang elastis dan mencakup semua kebutuhan siswa.¹⁰ Penelitian ini kemudian memadukan teori besar sosiologi pendidikan mahzab kritis dengan indikator praktis sekolah inklusi dari penelitian sebelumnya yang dilaporkan oleh Dyah S, pada Simposium Pusat Penelitian Kebijakan, Departemen Pendidikan Nasional pada November 2008.

Jika dirumuskan dalam sebuah pemetaan berfikir, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

⁹ Paulo Freire. *Pendidikan Kaum Tertindas*. (Jakarta: LP3ES, 1985) hlm. 182.

¹⁰ Paulo Freire. *Pendidikan Masyarakat Kota*. (Yogyakarta: LKIS, 2003)



Keterangan: ---➔ : Dukungan pihak luar sekolah yang secara tidak langsung berperan pada keberlangsungan akses pendidikan difabel di sekolah inklusi.

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan varian metodologi studi kasus untuk menjawab rumusan masalah. Studi kasus dilakukan di jenjang SMA khususnya SMA Pembangunan Yogyakarta. Jenjang SMA dipilih karena Departemen Pendidikan Nasional hanya menetapkan jenjang inklusi hanya sampai SMA. Siswa difabel yang bersekolah di SMA telah melalui proses pendidikan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sehingga proses ini akan memberikan penjelasan tentang sekolah inklusi yang lebih komprehensif. Lulusan SMA akan langsung terjun ke masyarakat, sehingga kualitas diri pribadi akan sangat menentukan citra dirinya dalam masyarakat. SMA Pembangunan Yogyakarta dipilih karena sekolah ini telah menetapkan diri sebagai sekolah inklusi sebelum ditetapkan surat edaran nomor 380/ C.C6/ MN/ 2003 tentang jumlah minimal sekolah inklusi di kabupaten. Pada 1989 sekolah ini mulai menerima siswa difabel.

Teknik pengumpulan data dilakukan penulis dengan observasi, penelusuran teks data kuantitatif dan kebijakan tentang sekolah inklusi dan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Adapun pihak-pihak yang akan menjadi narasumber dari penelitian ini yakni antara lain: Dinas Pendidikan Provinsi DIY selaku pembuat kebijakan, Organisasi Difabel yakni Dria Manunggal sebagai pelopor dan penggerak sekolah inklusi di Yogyakarta serta subjek pendidikan dalam SMA Pembangunan Yogyakarta yang mencakup kepala sekolah, guru pendamping khusus, guru mata pelajaran, siswa non-difabel dan siswa difabel.

D. Manifestasi Kesadaran Stakeholders Sekolah Inklusi

Stakeholders merupakan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam terselenggaranya sekolah inklusi. *Stakeholders* sekolah inklusi dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yakni perangkat di dalam sekolah inklusi dan pihak luar sekolah. Perangkat sekolah inklusi yakni guru, kepala sekolah dan siswa. Pihak luar sekolah mencakup Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pendidikan Luar Biasa, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai perwujudan wakil pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan pula kesadaran dan peran masing-masing *stakeholders* dalam mewujudkan suasana belajar yang inklusi dan tanpa diskriminasi.

Kesadaran dalam hal ini dipahami bahwa setiap subjek pendidikan harus mampu menganalisis kepentingan ideologis yang menyelimuti realitas.¹¹ Dalam hal ini realitas diskriminasi yang menjadi semangat lahirnya pendidikan inklusi di Indonesia. Negara selalu pembuat kebijakan belum sepenuhnya mendukung semangat keberagaman dalam sekolah inklusi.

Perwujudan kesadaran yang digunakan antara lain persepsi masing-masing subjek penelitian dalam rangka menciptakan suasana yang mendukung bagi sistem pembelajaran inklusi. Tidak semua perangkat dalam SMA Pembangunan Yogyakarta berupaya mewujudkan lingkungan yang jauh diskriminasi terhadap difabel. Terdapat beberapa guru yang tidak sadar mengenai kebutuhan difabel, namun persepsi salah satu guru pendamping khusus sebagai salah satu subjek

¹¹ Paulo Freire dalam *Pendidikan, Kekuasaan, dan Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) Hlm 2.

penelitian ini menguatkan salah satu hipotesis penulis bahwa guru pendamping khusus yang berasal dari organisasi difabel merupakan salah satu aktor pendobrak utama diskriminasi.

Sarwiasih, guru pendamping khusus di SMA Pembangunan Yogyakarta yang sebelumnya mengajar di Sekolah Luar Biasa Tunas Kasih, Sedayu, Bantul, diangkat menjadi guru pendamping khusus di SMA Pembangunan Yogyakarta pada 28 Juli 2007. Menurut Sarwiasih, siswa berkebutuhan khusus membutuhkan motivasi untuk maju. Pernyataan Sarwiasih mencerminkan bahwa ia berusaha mendekonstruksi kenormalan. Dekonstruksi tercermin ketika ia bertemu dengan siswa yang mengalami *celebral palsy*. *Celebral palsy* membawa konsekuensi bagi berkurangnya kemampuan motorik seseorang, terdapat dua kemungkinan manusia yang terkena *celebral palsy* yakni memiliki intelegensi tinggi atau intelegensi rendah. Sarwiasih mengungkapkan penanganannya terhadap siswa yang mengalami *celebral palsy* sebagai berikut:

"Anak ini termasuk cerdas. Saya belum mengetahui jika anak tersebut terkena *celebral palsy* pada waktu pertama kali bertemu. Saya menanyakan sesuatu di kelas dan temannya yang lain tidak ada yang berani menjawab. Satu-satunya yang menunjukan jarinya hanya anak *celebral palsy* ini, kemudian ia menjawab dengan terbata-bata. Saya berkata: 'Kamu bagus, cerdas, dan berani. Mengapa yang lain tidak berani mengungkapkan pendapat?' Dia mempunyai keberanian yang hebat daripada teman-temannya yang dikatakan normal. Saya bertanya kepada anak tersebut: 'Kamu merasa normal?' Ia menjawab 'Tidak.' Saya kemudian memberi pernyataan: 'Justru teman-teman anda yang tidak normal karena teman-teman anda tidak memiliki

keberanian untuk mengungkapkan pendapatnya.' Saya menilai siswa ini punya banyak impian di bidang tulis menulis, dengan motivasi-motivasi akhirnya ia memenangkan beberapa lomba karya tulis."

Sarwiasih menjelaskan bahwa potensi siswa difabel terkadang tidak tergali karena ia kurang motivasi, selain itu terdapat guru-guru yang tidak peduli dengan menyamakan sistem penilaian dan sistem pengajaran. Hal itu mengakibatkan beberapa siswa mengeluh padanya. Ia juga menyadari bahwa sistem dalam pendidikan Indonesia belum sepenuhnya mendukung proses belajar mengajar dalam sekolah inklusi.

Sarwiasih tetap berkomitmen dalam pengajaran inklusi. Ia menganggap masih banyak guru-guru yang belum begitu paham dengan metode pengajaran yang sensitif difabel, bahkan ada guru yang malu mengajar di sekolah luar biasa. Ia juga menyadari masih terdapat guru pendamping khusus lain yang kurang paham dengan pekerjaannya.

Sarwiasih merasa rekrutmen guru pendamping khusus yang dilakukan tidak memperhatikan kemampuan guru pendamping khusus dalam mengajar serta pengembangannya. Ia merasa bahwa terdapat salah satu oknum dari dinas yang membatasi pendapatnya ketika ia mengungkapkan apa yang dirasakannya terkait kemampuan guru pendamping khusus yang harus dikembangkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bagian Pendidikan Luar Biasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sarwiasih mengungkapkan bahwa orientasi salah satu oknum Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tersebut hanya demi terselenggaranya proyek, tidak berkelanjutan, dan tidak memfasilitasi siswa dengan baik. Ia

menilai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kurang memperhatikan perkembangan inklusi. Birokrasi dalam pelaksanaan sekolah inklusi juga terputus di Dinas Pendidikan kota dan kabupaten. Pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengaku tidak mengetahui segala hal terkait penyelenggaraan sekolah inklusi di Kota Yogyakarta ketika penulis mencari data disana. Penulis akhirnya harus mencari data tentang sekolah inklusi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bagian Pendidikan Luar Biasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terputusnya birokrasi dan tertutupnya keterbukaan pendapat diantara semua *stakeholders* pendidikan menurut Freire merepresentasikan pola komunikasi yang tidak simetris antara pemegang kekuasaan. Pola komunikasi yang tidak simetris ini merupakan wujud pemaksaan.¹² Hal tersebut mendekati tindakan antidialogis yang bermuara pada dominasi.

Beberapa aktor yang lain mencoba berkompromi dengan tindakan antidialogis untuk mengubah konstruksi diskriminasi salah satunya siswa difabel. Beberapa dari siswa difabel yang diwawancara tidak peduli terhadap tindakan diskriminasi secara verbal. Siswa difabel beranggapan diskriminasi semakin luntur jika antar siswa yang berbeda memiliki kepentingan dalam berinteraksi. Aryo Widi, salah satu siswa tunanetra yang menjadi narasumber mengaku;

"Bentuk ejekan kepada saya memang ada, apalagi saat pertama mengikuti proses belajar sekolah ini. Saya membiarkannya dan tidak terlalu mengingatnya. Sewaktu saya belajar di sekolah menengah pertama dulu bentuk

cemoohannya justru lebih kasar. Saya sempat mengadu ke kepala sekolah, tapi setelah itu teman-teman memusuhi saya. Saya tidak memikirkan ejekan itu, yang penting teman saya tidak bertindak macam-macam. Setelah beberapa waktu sekolah disini saya sudah tidak pernah lagi dicemooh. Saya justru sering bergabung dengan teman yang nakal-nakal itu tapi saya tidak mau jika mereka mengajak bertindak macam-macam. Bentuk interaksi saya kepada mereka misalnya saya ikut bergabung jika sedang membicarakan sesuatu."

Vindi, siswa tunanetra yang lain terdorong untuk melakukan perubahan, ia lebih memilih bersekolah di sekolah inklusi karena ia merasa lebih mandiri dan lebih terbiasa untuk berinteraksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda. Ia juga menilai ijazah sekolah luar biasa tidak dapat dipergunakan untuk mendaftar perguruan tinggi, sedangkan ia sangat ingin melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi dan membuktikan kemampuannya. Terkait penyesuaian difabel Vindi tidak mengalami banyak kesulitan, berikut pernyataannya yang dipetik dari dokumen wawancara;

"Saya tidak memiliki masalah apabila berjalan kaki. Pengemudi becak atau polisi pasti menolong saya di perempatan penyeberangan. Saat pertama kali tiba disini, saya melakukan orientasi mobilitas untuk mengenal lingkungan agar terbiasa. Saya menghafalkan jalan, tanjakan naik dan turun, dan kamar mandi. Saya pun mengetahui beberapa hal dari hasil orientasi ini misalnya jika dari kos ke sekolah ada jalan berkelok sekian langkah, atau bertanda seperti apa. Saya mengajak teman saya yang sudah tahu

¹² Paulo Freire, *Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, op. cit., hlm 4.

untuk membantu menjelaskan setiap ruangan untuk orientasi dalam sekolah."

E. Upaya Pembebasan Difabel dan Kerjasama antar Stakeholders Sekolah Inklusi dengan Tindakan Dialektis dan Dialog.

Pendidikan inklusi ditujukan pada semua kelompok yang termarginal.¹³ Difabel sebagai katalisator utama mengembangkan pendidikan inklusi yang efektif, fleksibel dan tanggap terhadap keanekaragaman belajar. Mendidik masyarakat prinsipnya yakni kembali pada realitas mereka untuk kemudian mendesain dunia baru yang didambakan.¹⁴ Pada realitasnya, difabel yang termarginal mendambakan lingkungan inklusi.

Bentuk perubahan pendidikan tersegregasi hingga munculnya sekolah inklusi timbul sebagai konsekuensi atas adanya dominasi kebijakan pendidikan yang memarginalkan difabel. Perubahan tersebut mencerminkan bahwa pendidikan merupakan surat perjanjian khusus dengan dominator untuk menentukan kehidupan sosial di masa datang.¹⁵ Penulis memaknai surat perjanjian khusus ini merupakan perwujudan tindakan dialektis yang menjadi dasar kerjasama antara penguasa dan difabel.

Tindakan dialektis merupakan bentuk komunikasi tanpa kuasa untuk keluar dari sebuah dominasi.¹⁶ Dominasi dalam konteks ini yakni segregasi pendidikan yang menjadi paradigma

pendidikan untuk difabel sebelum sekolah inklusi didirikan. Cerminan tindakan marginal tidak hanya timbul dari pemerintah namun juga masyarakat di sekitar lingkungan difabel tinggal. Sekolah inklusi muncul sebagai upaya membebaskan manusia dari penindasan terhadap difabel.

Sebagai prasyarat dari pembebasan yakni kesadaran, tindakan dialektis dan dialog. Jika kesadaran telah dibahas di bagian sebelumnya, maka pada bagian ini akan diperinci dialog dalam konteks sekolah inklusi. Dialog merupakan upaya kerjasama yang menempatkan tanggung jawab guru sebagai teman dialog siswa daripada hanya pemindah informasi yang harus diingat siswa. Guru pemindah yang demikian hanya mengulang apa yang dibacanya. Dialog tidak hanya dalam konteks guru dan siswa tetapi juga antar stakeholders sekolah inklusi. Pengambilan keputusan yang menyangkut penyelenggaraan inklusi pun memerlukan dialog antar subjek menjadi syarat pembebasan peserta didik.

- Manifestasi Dialog

(i) Penerimaan Siswa dan Asesmen Pendahuluan Pada Calon Siswa Saat Penerimaan

Asesmen merupakan proses identifikasi siswa. Buku pedoman sekolah inklusi menjelaskan bahwa kegiatan identifikasi bertujuan pada menemukan secara kasar apakah seorang anak difabel tergolong anak dengan kebutuhan khusus atau bukan.

SMA Pembangunan Yogyakarta memberikan identifikasi dan asesmen saat penerimaan siswa. Beberapa siswa difabel yang mendaftar di SMA Pembangunan Yogyakarta selama ini yakni tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan tunadaksa. Sistem penerimaan siswa tidak berdasarkan kriteria nilai ujian akhir nasional minimal atau kriteria intelegensi lainnya.

¹³ Sue Stubbs, *op. cit.*, hlm 93.

¹⁴ Paulo Freire, *Pedagogi Pengharapan* diterjemahkan oleh A Widya Martaya (Yogyakarta: Kanisius., 2001) hlm 39.

¹⁵ Paulo Freire, *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, *op. cit.*, hlm 16.

¹⁶ *Ibid*, hlm 6.

Sebagai subjek utama dalam sekolah inklusi, siswa difabel dilibatkan dalam asesmen menyangkut kebutuhan belajar yang harus dicukupi pada nantinya. Pada saat asesmen, siswa difabel ditanya tentang kemampuan belajarnya, hal-hal yang menghambat proses belajarnya dan kebutuhan-kebutuhan yang harus dicukupi pihak sekolah untuk anak yang bersangkutan. Guru dan kepala sekolah mengadakan rapat rutin setiap semester untuk memantau perkembangan asesmen siswa.

(ii) Modifikasi Kurikulum setelah Asesmen

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 19 disebutkan bahwa:

"Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu."

Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Departemen Pendidikan Nasional dalam buku pedomannya mengenai kurikulum sekolah inklusi menegaskan bahwa kurikulum pendidikan inklusi menggunakan kurikulum sekolah reguler/ nasional yang dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan difabel yang berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kecerdasannya. Modifikasi kurikulum dilakukan terhadap:

a. Alokasi waktu

Modifikasi alokasi waktu juga dilakukan di SMA Pembangunan Yogyakarta Maruli mengakui bahwa terdapat pengulangan materi pengajaran di SMA Pembangunan Yogyakarta untuk siswa lamban belajar maupun siswa yang membutuhkan. Maruli menyatakan bahwa pemerintah belum sepenuhnya

mengizinkan adanya remidi meskipun buku pedoman telah menegaskan penambahan waktu

b. Isi materi kurikulum

Pada siswa tunanetra tidak diterapkan penurunan isi materi. Dalam hal intelegensi, hasil asesmen biasanya menyatakan bahwa kecenderungan intelegensi tunanetra pada rata-rata bahkan di atas rata-rata. Untuk mata pelajaran yang membutuhkan intelegensi, biasanya tidak ada perubahan atau pengurangan materi dalam silabus.

Dalam beberapa pelajaran tertentu, SMA Pembangunan Yogyakarta menerapkan modifikasi kurikulum. Standar isi mengikuti sekolah reguler dengan tambahan-tambahan program khusus berdasarkan keberbedaan siswa. Jika terdapat siswa lamban belajar yang mendaftar maka akan diadakan pengurangan materi.

c. Modifikasi standar penilaian

Stakeholders SMA Pembangunan Yogyakarta juga melakukan modifikasi nilai dan silabus menurut perbedaan masing-masing anak dan menanamkan jiwa kompetisi dan kooperatif. Salah satu guru menceritakan salah satu kasus, misalnya bagi siswa yang intelegensi normal atau rata-rata mendapatkan nilai 6,5 untuk satu mata pelajaran, dan siswa lamban belajar juga mendapat nilai yang sama. Ia kemudian menaikkan nilai siswa yang lamban belajar ini menjadi 7. Guru tersebut menilai bahwasanya ada upaya keras dari siswa lamban belajar untuk menaikkan nilai ujian.

Penambahan nilai tidak hanya sekedar ada karena iba dan menutup kompetisi. Proses modifikasi evaluasi hasil belajar juga berdasar kebutuhan untuk menindaklanjuti asesmen yang telah dilakukan dengan penurunan porsi materi. Porsi materi dan standar

penilaian akan dinaikan jika prestasi siswa lamban belajar ini terus meningkat. Hal itu dilakukan agar siswa lamban belajar dapat semakin berkompetisi.

d. Proses belajar-mengajar

Guru menggunakan pendekatan *student center*, yang menekankan perbedaan individual setiap anak. Guru pendamping khusus dan guru mata pelajaran yang menjadi narasumber Disesuaikan dengan berbagai tipe belajar siswa: visual, auditoris, dan kinestetis. Tipe visual, yaitu lebih mudah menyerap informasi melalui indera penglihatan. Tipe auditoris, yaitu lebih mudah menyerap informasi melalui indera pendengaran. Tipe kinestetis, yaitu lebih mudah menyerap informasi melalui indera perabaan/gerakan.

e. Sarana dan prasarana

Di SMA Pembangunan Yogyakarta belum semua sarana yang ada dalam pedoman tersedia. Terdapat siswa tunanetra, tunarungu, lamban belajar, bakat khusus dan tunadaksa di SMA Pembangunan Yogyakarta. Sarana yang ada hingga saat ini yakni; ramp, lapangan kecil, lantai *con block*, kursi roda, buku braile, ruang audio band dan komputer berperangkat lunak untuk tunanetra. Sarana yang ada belum mencukupi kebutuhan sarana khusus.

f. Lingkungan belajar, dan pengelolaan kelas

Guru pendamping khusus mempraktekan diskusi dengan anak didik dengan penyusunan ruang duduk melingkar. Ia sering melibatkan semua anak yang berbeda di satu forum untuk menyelesaikan masalah salah satu siswa yang ada di forum tersebut dengan berdiskusi.

F. Kendala dalam Upaya Pembebasan

Pada sub bab ini akan diungkapkan beberapa kendala utama yang menghambat upaya pembebasan dari diskriminasi terhadap difabel di Sekolah inklusi antara lain:

1. Kurangnya bahan ajar yang sesuai dan mendukung keberbedaan masing-masing anak.
2. Pelatihan yang diberikan dari bagian Pendidikan Luar Biasa, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada penmgajar di sekolah inklusi kurang variatif. Sarwiasih menilai bahwa materi yang diberikan saat pelatihan selalu sama misalnya asesmen macam-macam anak berkebutuhan khusus dan kurang aplikatif. Tujuan pelatihan ini adalah agar berefek langsung pada siswa di sekolah inklusi. Tujuan ini masih belum dipahami beberapa guru pendamping khusus.
3. Kurangnya sumber daya manusia. Menurut kepala sekolah sebagaimana tertuang dalam wawancara kepada beliau, kendala ini sering dirasakan kala dalam kelas ada siswa yang berbeda lebih dari dua macam. Dalam hal ini idealnya membutuhkan semacam tim pengajar dalam kelas tersebut. Pengajar di SMA Pembangunan Yogyakarta pun harus dapat berperan sehingga materi pelajaran dapat diterima oleh semua anak.
4. Standar ujian akhir nasional juga menjadi kendala terberat isu inklusifitas. Jika dihadapkan pada standar nilai ini, maka

semua subjek di SMA Pembangunan Yogyakarta merasa kesulitan lantaran banyak siswa yang lamban belajar di SMA Pembangunan Yogyakarta. Selain itu, kendala ini memunculkan kasus baru antara lain turunnya semangat belajar siswa. Standarisasi menjadi beban bagi sekolah tat kala pemerintah tidak membekali sekolah dengan bantuan pengajaran untuk sekolah inklusi.

5. Beberapa kebijakan masih membatasi akses difabel dalam sekolah inklusi lantaran tidak semua difabel direkomendasikan pemerintah untuk bersekolah di sekolah inklusi.
6. Tidak semua guru yang mengajar memiliki sensitifitas terhadap difabel.

Sekolah inklusi telah menunjukkan pencapaiannya dalam pengurangan diskriminasi terhadap difabel dari diskriminasi walau terdapat beberapa kendala kebijakan tidak mendukung yang menjadi beban sekolah. Interaksi yang terjalin antar siswa yang berbeda-beda dan berlangsung sering mampu mengurangi perlakuan-perlakuan diskriminasi yang dialami difabel. Beberapa siswa difabel mengaku lebih percaya diri menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat yang inklusif.

G. Identifikasi dan Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Diskriminasi Difabel di Sekolah Inklusi

Diskriminasi terhadap difabel di sekolah inklusi dikatakan sangat tinggi ketika difabel tidak dilayani untuk mendapatkan akses-akses pendidikan serta tidak dilayani dengan modifikasi

yang sudah distandarkan oleh pemerintah.

Terdapat beberapa faktor dalam penelitian ini yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat diskriminasi di sekolah inklusi. Pengaruh faktor-faktor tersebut akan dijelaskan penulis dalam grafik sebagai berikut:



Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya diskriminasi terhadap difabel di sekolah inklusi

Keterangan:

SR : Sangat rendah

R : Rendah

T : Tinggi

ST : Sangat tinggi

A : Kesadaran *stakeholders*.

B : Asesmen pendahuluan.

C : Modifikasi alokasi waktu.

D : Modifikasi isi materi.

I : Kebijakan pemerintah tentang sekolah inklusi

E : Modifikasi standar penilaian.

F : Modifikasi proses mengajar

G : Modifikasi sarana dan prasarana

H : Modifikasi lingkungan belajar

J : Dukungan lembaga swadaya masyarakat

Hampir semua faktor diatas berpengaruh terhadap penurunan diskriminasi terhadap difabel di sekolah inklusi. Persepsi *stakeholders* tentang kesadaran penghapusan diskriminasi tidak terlalu berdampak pada pemenuhan akses pendidikan bagi difabel. Modifikasi cara mengajar, isi materi dan penilaian mampu memantau secara periodik perkembangan

kemampuan difabel serta dapat memberikan rekomendasi bagi asesmen dan perlakuan mengajar untuk difabel di masa selanjutnya. Diskriminasi dalam wujud verbal oleh siswa non-difabel juga dapat dikurangi secara periodik dengan menciptakan lingkungan belajar yang melibatkan difabel untuk berpartisipasi dalam proses belajar mengajar.

H. Kesimpulan dan Saran

Penulis menyimpulkan bahwa dalam proses kesadaran dan kerjasama antar *stakeholders* pendidikan inklusi masih terdapat diskriminasi. Diskriminasi terhadap difabel tidak lantas membuat sekolah inklusi terancam eksistensinya. Terdapat kekuatan-kekuatan pendukung lain dalam bertahannya sekolah inklusi dalam memperjuangkan akses pendidikan untuk difabel. Kekuatan pendukung tersebut antara lain berjalannya beberapa mekanisme modifikasi kurikulum di SMA Pembangunan serta kehendak baik semua guru pendamping khusus, guru mata pelajaran dan fasilitator untuk menjalankannya. Dalam perkembangan sekolah inklusi ke depan, pemerintah perlu membangun komunikasi yang baik dengan aktor emansipasi yakni organisasi difabel agar tercapai suatu kebijakan yang saling kungruen, bukan kebijakan yang bersifat antagonis satu sama lain.

Daftar Pustaka

- Baker, E.T, *Metaanalysis evidence for non-inclusive educational practices*, disertasi doktor (Pennsylvania: Temple University, 1994)
- Befring, Edvard & Tangen, Reidun, *Special Needs of Education* (Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 1994)
- Coleridge, Peter, *Pembebasan dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
- Freire, Paulo, *Pendidikan Kaum Tertindas*. (Jakarta: LP3ES, 1985)
- _____, *Pendidikan Masyarakat Kota* (Yogyakarta: LKIS, 2003)
- _____, *Pedagogi Pengharapan* (Yogyakarta: Kanisius., 2001)
- _____, *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- _____, *Pedagogy of the Oppressed* (New York: Herder and Herder, 1971)
- _____, *Cultural Action for Freedom*. (Harmondsworth: Penguin, 1972)
- _____, *Politics and Education*. (University of Californai, LA: UCLA Latin American Cneter Publications, 1998)
- Kompas* (5 Juli 2007) hlm 36, kolom 5.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)
- Nuryatno, M. Agus, *Mahzab Pendidikan Kritis, Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Resist Book, 2008)
- Stubbs, Sue, *Inclusive Education Where There Are Few Resources* (Oslo: The Atlas Alliance, 2002)
- Sudiarja, A, "Driyarkara: Pendidikan Kepribadian Nasional", *Basis*, No. 07-08, hlm 4-13, Juli-Agustus 2007.

Wardi, Udin dan Asharto, "UU Penca Belum Penuhi Aspirasi Difabel", *Solider*, Edisi 1, hlm 2-3, November-Desember 2005.

Undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 47 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009.